

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Pesut RT.VII No.130 Kel. Timbau Telp. (0541) 6667077, Fax. (0541) 6667052 / 6667183,
Email: dishubkukar@yahoo.co.id
TENGGARONG – 75511



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai dalam menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada setiap akhir tahun anggaran menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk dilaporkan kepada Bupati Kutai Kartanegara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 ini merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja pada tahun 2022, guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2022. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah serta masyarakat pada umumnya.

Wassala'mualaikum, Wr. Wb.

Tenggarong, 22 Pebruari 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara



Ahmad Junaidi, S.Pd.,MM

Pembina TK.I

NIP. 19720224 199203 1 006

RINGKASAN LKjIP

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022, dengan ini perlu di susunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022, yang dalam penyusunannya akan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan akuntabilitas kinerja, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran sesuai RPJMD, yaitu: “Meningkatnya aksesibilitas dan Konektifitas wilayah” mempunyai indikator kinerja, yaitu: Indeks aksesibilitas wilayah. Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 84,18% target capaian sebesar 100%, dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 100%.
2. Sasaran 1 Renstra, yaitu: “Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perhubungan”, diukur dengan indikator, yaitu:
Pada tahun 2022 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di bidang Perhubungan ditargetkan dengan nilai “78” atau dengan interpretasi “ Baik”. Kemudian dari hasil analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 telah memperoleh nilai kepuasan sebesar 83,84 dengan mutu pelayanan B yang berarti bahwa kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan adalah BAIK.
3. Sasaran 2 Renstra, yaitu: “Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana serta Fasilitas Perhubungan”, diukur dengan 4 indikator, yaitu:
 - a. Prosentase ketersediaan prasarana Jalan. Berdasarkan target kinerja pada tahun 2022 ditargetkan tercapai 29,25% kemudian telah dicapai realisasi kinerja sebesar 29,25%, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai target, yaitu sebesar 100% atau telah sesuai target;
 - b. Prosentase ketersediaan perlengkapan Jalan Berdasarkan target kinerja pada tahun 2022 ditargetkan tercapai 1,16% kemudian telah dicapai realisasi kinerja sebesar 1,16%, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai target, yaitu sebesar 100% atau telah sesuai target;
 - c. Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal Berdasarkan target kinerja pada tahun 2022 ditargetkan tercapai 27% kemudian telah dicapai realisasi kinerja sebesar 27%, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai target, yaitu sebesar 100% atau telah sesuai target;

- d. Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Berdasarkan target kinerja pada tahun 2022 ditargetkan tercapai 25% kemudian telah dicapai realisasi kinerja sebesar 25%, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai target, yaitu sebesar 100% atau telah sesuai target
4. Sasaran 3 Renstra, yaitu: “Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kinerja Aparatur”, diukur dengan indikator, yaitu:
Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan target kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 82 dan pada hasil penilaian 2021 telah dicapai realisasi kinerja sebesar 77,90, dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 95 %, yaitu Belum mencapai target;

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN LKjIP	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR/ BAGAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Penyusunan LKjIP	2
1.3. Profil Organisasi	4
1.3.1. Tugas dan Fungsi	4
1.3.2. Susunan Organisasi	4
1.4. Tujuan Penyusunan	7
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Kinerja Tahun 2022	9
2.2. Rencana Anggaran Tahun 2022	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan	28
3.1.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)	28
3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022	29
3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan dan tahun 2022.....	29
3.2. Analisis Capaian Kinerja	31

3.2.1	Analisis Capaian Kinerja Sasaran RPJMD	31
1.	<u>Indikator sesuai RPJMD</u> : “Meningkatnya aksesibilitas Konektifitas dan Konektifitas wilayah (BAB 5 RPJMD)”	31
3.2.2	Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 Renstra	32
1.	<u>Indikator</u> : “Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat “.....	32
3.2.3	Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 Renstra	38
1.	<u>Indikator 1</u> : “Prosentase ketersediaan prasarana Jalan	38
2.	<u>Indikator 2</u> : “Prosentase ketersediaan perlengkapan Jalan ..	39
3.	<u>Indikator 3</u> : “Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	40
4.	<u>Indikator 3</u> : “Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan.....	40
3.2.4	Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 Renstra	41
1.	<u>Indikator</u> : “Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kinerja Aparatur”	41
3.3	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya SKPD	42
3.3.1	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)	43
3.3.2	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Aset	45
3.3.3	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan	46
3.4	Realisasi Anggaran SKPD	47
BAB IV.	PENUTUP	54
4.1.	Tinjauan Keberhasilan	54
4.2.	Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja	55
4.3.	Langkah-Langkah di Masa Mendatang	56

DAFTAR TABEL

	Hlm
<u>BAB II:</u>	
Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahun 2022	9
Tabel 2.2. Rincian Rencana Kinerja Tahun 2022	10
Tabel 2.3. Rincian Rencana Penganggaran Tahun 2022	11
 <u>BAB III:</u>	
Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022	28
Tabel 3.1.2 Daftar Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	29
Tabel 3.1.3 Daftar Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022	30
Tabel 3.5. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	35
Tabel 3.6. Nilai Rata-Rata Tiap Unsur Pelayanan Keseluruhan Unit Pelayanan)	35
Tabel 3.7. Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan Keseluruhan Unit Pelayanan	36
Tabel 3.8. Nilai Rata-Rata Per Tertimbang Pelayanan Keseluruhan Unit Pelayanan	34
Tabel 3.9. Konversi Indeks Pelayanan	38
Tabel 3.3.1 Daftar Penggunaan SDM/Aparatur Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	45
Tabel 3.3.2 Jumlah Nilai Aset Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2022	46
Tabel 3.4.1. Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2022	47
Tabel 3.4.2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2022	48
Tabel 3.4.3. Realisasi Anggaran untuk Mewujudkan Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	49

BAB IV:

Tabel 4.1. Capaian Kinerja Masing-Masing Sasaran Tahun 2022	54
---	----

DAFTAR GAMBAR/ BAGAN

<u>BAB I:</u>	Hlm
Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	6

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
- Lampiran 3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022
- Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Pegawai Tahun 2022
- Lampiran 5. Informasi Kinerja LKjIP Tahun 2022
- Lampiran 6. Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2022
- Lampiran 7. Rencana Aksi Tahun 2022
- Lampiran 8. Pohon Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Kukar
- Lampiran 9. Jadwal Penyusunan LKjIP Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Kutai kartanegara dewasa ini juga sangat ditentukan oleh peranan dari sektor transportasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena sistem transportasi harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas orang, barang dan jasa, mendukung pola distribusi regional serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

Ada banyak hal yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam konteks Renstra. Namun, banyak pula permasalahan dan tantangan yang masih harus diselesaikan. Karena itulah, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang Pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh Jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sesuai dengan visi dan misi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang terealisasi melalui program dan kegiatan tersebut, dengan ini perlu di susunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dalam penyusunannya akan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kab. Kutai Kartanegara tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Penyusunan LKjIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender daerah;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten /Kota;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 07 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013 -2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Perhubungan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2022;

1.3. Profil Organisasi

1.3.1. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, Tugas Dinas Perhubungan adalah “melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perhubungan”.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di Bidang Perhubungan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perhubungan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perhubungan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perhubungan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

1.3.2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari :

a. Kepala Dinas

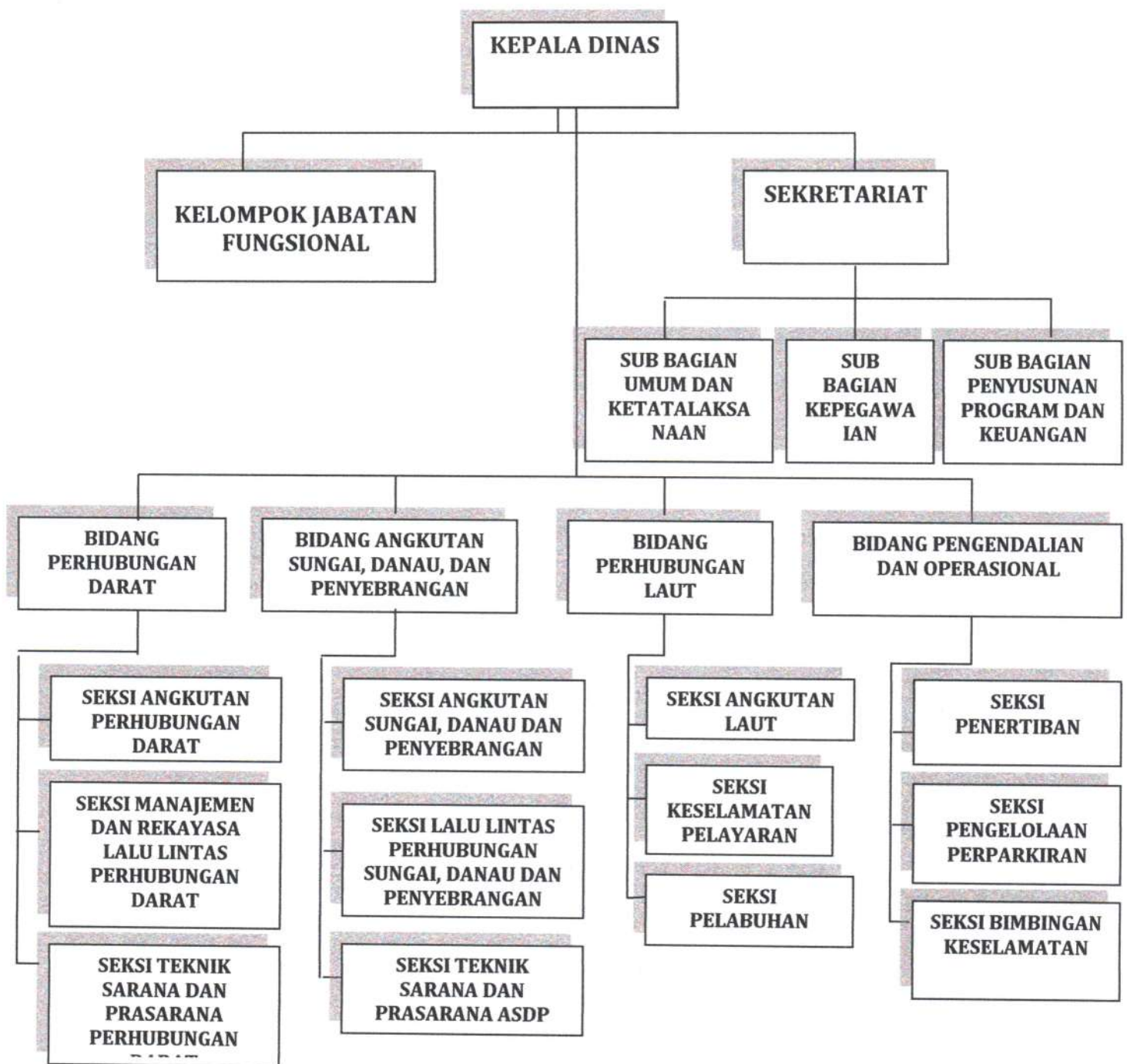
b. Sekretariat, membawahkan :

- 1) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
- 2) Sub Bagian Kepegawaian;
- 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :

- 1) Seksi Angkutan Perhubungan Darat;
- 2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perhubungan Darat;
- 3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat.

- d. Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan;
 - 2) Seksi Lalu Lintas Perhubungan Sungai, Danau dan Penyebrangan;
 - 3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana ASDP.
- e. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :
 - 1) Seksi Angkutan Laut;
 - 2) Seksi Manajemen Keselamatan Pelayaran;
 - 3) Seksi Pelabuhan.
- f. Bidang Pengendalian dan Operasional, membawahkan
 - 1) Seksi Penertiban;
 - 2) Seksi Pengelolaan Perparkiran;
 - 3) Seksi Bimbingan Keselamatan.
- g. Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.
Kabupaten Kutai Kartanegara

1.4. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- 1.4.1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, yaitu Bupati Kutai Kartanegara, atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.4.2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan kinerjanya.

1.5. Sistematika Penulisan

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1.5.1. Bagian Awal

Pada bagian awal berisikan: Kata Pengantar, Tim Penyusun, Ringkasan LKIP, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar/ Bagan, dan Daftar Lampiran.

1.5.2. Bagian Inti, meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Dasar Penyusunan LKjIP, Profil Organisasi, Tujuan Penyusunan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Berisi Tabel Rencana Kinerja Tahun 2022, Tabel Rincian Rencana Kinerja, dan Rincian Rencana Penganggaran Tahun 2022.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Berisikan capaian kinerja dari sasaran strategis. Menguraikan mengenai Analisis Capaian Kinerja melalui Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja masing-masing Sasaran. Kemudian menjelaskan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya SKPD. Kemudian menjelaskan mengenai Realisasi Anggaran SKPD, dan

Menjelaskan Prestasi atau Penghargaan yang telah diperoleh pada tahun 2022.

BAB IV : PENUTUP

Menjelaskan mengenai Tinjauan Keberhasilan, Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja, dan Langkah-Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Dinas Perhubungan untuk meningkatnya kinerjanya.

1.5.3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir berisikan lampiran-lampiran yang diperlukan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berdasarkan perjanjian kinerja dalam Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartabegara tahun 2022, maka sebagai tolak ukur pencapaian kinerja pada tahun 2022, dibuatlah rencana Rencana kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target, sebagai berikut:

2.1. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Kinerja
(1)	(2)		(3)
<u>Sasaran sesuai RPJMD:</u>			
Meningkatnya aksesibilitas dan Konektifitas antar wilayah	1	Indeks aksesibilitas antar wilayah	84,18
<u>Sasaran 1 Renstra:</u>			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perhubungan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78
<u>Sasaran 2 Renstra:</u>			
Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana serta Fasilitas Perhubungan	1	Prosentase ketersediaan prasarana Jalan	29,25%
	2	Prosentase ketersediaan perlengkapan Jalan	1,16%
	3	Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	27%
	4	Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	25%
<u>Sasaran 3 Renstra:</u>			
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kinerja Aparatur	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	82

Kemudian secara lebih rinci mengenai rencana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2.2
Rincian Rencana Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi	Target Kinerja
(1)	(2)		(3)	(4)
Sasaran sesuai RPJMD:				
Meningkatnya aksesibilitas dan Konektifitas antar wilayah	1	Indeks aksesibilitas antar wilayah	Jumlah (komulatif) Kecamatan yang memiliki sarana, prasarana, fasilitas perhubungan yang layak dibagi jumlah seluruh Kecamatan dikali 100%	84,18
Sasaran 1 Renstra:				
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perhubungan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan dari Dinas Perhubungan	78
Sasaran 2 Renstra:				
Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana serta Fasilitas Perhubungan	1	Prosentase ketersediaan prasarana Jalan	Jumlah (komulatif) prasarana Jalan yang tersedia dibagi jumlah prasarana jalan yang seharusnya tersedia dikali 100%	29,25%
	2	Prosentase ketersediaan perlengkapan Jalan	Jumlah (komulatif) perlengkapann Jalan yang tersedia dibagi jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia dikali 100%	1,16%
	3	Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah (komulatif) Sarana dan Prasaran Pelabuhan Pengumpan Lokal yang tersedia dibagi jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal yang seharusnya tersedia dikali 100%	27%

	4	Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah (komulatif) Sarana dan Prasaran Pelabuhan Sungai, Danau Dan Penyeberangan yang tersedia dibagi jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau Dan Penyeberangan yang seharusnya tersedia dikali 100%	25%
<u>Sasaran 3 Renstra:</u>				
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kinerja Aparatur	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Hasi evaluasi LKJIP oleh Inspektorat tiap tahunnya	82

2.2. Rencana Anggaran Tahun 2022

Rencana anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rincian Rencana Penganggaran Tahun 2022

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja/RKPD 2022			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu lndikatif
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kab. Kukar	Predikat Akuntabilitas Dinas Perhubungan	80	30.106.326.672,00
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	325.000.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan	4	100.000.000,00
1	Peysusunanan Dokumen IKM			-	-

2	<i>Pendampingan reviu Penyusunan Dok Renstra BLUD PKB</i>			-	-
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3	75.000.000,00
1	<i>Penyusunan dokumen SPIP</i>		-	-	-
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan	2	150.000.000,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase penyelenggaraa n administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	14.021.290.995,00
4	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	12	13.871.290.995,00
5	Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tenggarong	Jumlah Kegiatan penyelesaian pembayaran utang	2	
1	<i>Pembayaran sisa utang pembangunan pelabuhan laut samboja (fisik) + pengembalian STS BPK</i>			1	
2	<i>Pembayaran utang Mananemen Konstruksi pembangunan pelabuhan laut samboja (jasa konsultan)</i>			-	-

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	12	100.000.000,00
1	<i>Gaji/ tunjangan pejabat/penanggung jawab pengelolaan keuangan</i>		-	-	-
7	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tenggarong	Jumlah Dokumen	3	50.000.000,00
III	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100.000.000,00
8	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan	1	100.000.000,00
V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,5	250.000.000,00
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kukar	-	-	-
1	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta kelengkapannya</i>		-	-	-
2	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta kelengkapannya</i>		-	-	-

3	<i>Pakaian Dinas Hari - hari tertentu (olah raga, miskat, batik, korpri , PDU)</i>		-	-	-
10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1	50.000.000,00
11	Monitoring, Evaluasi	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan	1	50.000.000,00
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	20	100.000.000,00
1	<i>Diklat teknis ASN</i>		-	-	-
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Kegiatan	4	50.000.000,00
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Kegiatan	4	-
1	<i>Bekias/Reformasi Birokrasi</i>		-	-	-
2	<i>Penilan Pelajar Pelopor Keselamatan</i>		-	-	-
3	<i>Penyuluhan keselamatan lalin kepada pelajar</i>		-	-	-
4	<i>Peningkatan kompetensi petugas lapangan</i>		-	-	-
5	<i>Bimtek/pembinaan kepada para juru parkir</i>		-	-	-

VI	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	903.032.421,00
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Komponen dan Instalasi Listrik	200	100.000.000,00
1	<i>Pengadaan lampu sorot LED 100 watt (lampu hias jembatan kuala samboja</i>				-
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	-	-	-
1	<i>Pengadaan sound sistem rapat (3 ruang), laptop (7), Tab (4), AC split (5 unit), PC 10 unit), power amply (2), Microphone wireless Kulkas, TV, Karpas, Spring Bad, gordas, kompor+ tabung gas</i>		-	-	-
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Jenis Barang ATK	Jenis Barang	78.032.421,00
1	<i>Kegiatan Hari Perhubungan Nasional</i>		-		-
2	<i>Tambahan Biaya Makan Minum Rapat</i>		-		-
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tenggarong	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	75.000.000,00
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Orang/ASN	Orang	500.000.000,00
1	<i>kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar kota</i>		-	-	

20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah kegiatan	Kegiatan	100.000.000,00
21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	50.000.000,00
VII	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	-
22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	-	-	-	-
1	<i>Pengadaan Mobil Patwal (1 unt) Motor Patroli (5 unt), Kapal ces (2unit), beserta kelengkapannya</i>		-	-	-
23	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	-
1	<i>Pengadaan sepeda patroli Dishub grece</i>		-	-	-
24	Pengadaan Mebel	-	-	-	-
1	<i>Pengadaan meja dan kursi ruang rapat, sofa, meja dan kursi makan, ranjang/tempat tidur, lemari pakaian, rak piring, lemari buffet (mebeler rumah jabatan kadis)</i>	-	-	-	

25	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	-	-	-	-
1	<i>Pengadaan palang parkir otomatis</i>	-	-	-	-
VIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	13.807.003.256,00
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah rekening tagihan	5	9.165.911.608,00
1	<i>Pembayaran rek Internet speedy dan rek listrik LPJU</i>		-	-	-
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah THL dan Petugas kebersihan	238	4.641.091.648,00
IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	700.000.000,00
28	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tenggarong	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	23	200.000.000,00

1	Penambahan BBM kendaraan dinas jabatan				-
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	31	200.000.000,00
1	Penambahan BBM kendaraan operasional		-	-	-
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah peralatan dan mesin dan Rambu Suar yang dipelihara	167	100.000.000,00
1	Pemeliharaan Rambu Suar			-	-
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang dipelihara	3	100.000.000,00
1	Rehab rumah dinas jabatan Kadis			-	-
2	Rehabilitasi ruang subbag program dan ruang rapat			-	-
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang dipelihara	1	100.000.000,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN		Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Serta Fasilitas LLAJ	30,41	5.770.835.000,00
X	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Prosentase Ketersediaan Prasarana Dan Perlengkapan Jalan	1,16	2.420.000.000,00

33	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota	Kab. Kukar	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang disediakan (LPJU)	250	1.320.000.000,00
1	Penyediaan LPJU Kel. M Jawa Tengah dan M. Jawa ilir	-	-	-	-
2	Penyediaan LPJU Kel. M Jawa pesisir dan M. Jawa ulu	-	-	-	-
3	Penyediaan LPJU Kel.Teluk Dalam Kec. M. Jawa	-	-	-	-
4	Pengadaan dan pemasangan LPJU (lampu hias) jembatan kuala samboja	-	-	-	-
5	Pengadaan dan pemasangan LPJU pasar kuala samboja	-	-	-	-
6	Pengadaan dan pemasangan LPJU sungai merdeka	-	-	-	-
7	Penyediaan LPJU di desa JonggonC	-	-	-	-
34	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Kab. Kukar	Jumlah Prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara (Rambu dll)	1456	100.000.000,00
1	Rehabilitasi dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan dan trafig light			-	-
35	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Kukar	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang dipelihara (LPJU)	262	1.000.000.000,00
1	Pemeliharaan dan revitalisasi LPJU Jln. KH. Ahmad Muksin dan Jln. Wolter Monginsidi Tenggarong (Penambahan ornamen motif kutai lampu hias)	-	-	-	-

2	Rehabilitasi dan pemeliharaan lampu hias jembatan Kutai Kartanegara	-	-	-	-
3	Rehabilitasi dan pemeliharaan LPJU teluk ladang dan akses jalan kuburan muslimin	-	-	-	-
4	Pemeliharaan dan revitalisasi LPJU Jl. Aritmuu yani handil II (penambahan ornamen lampu hias)	-	-	-	-
5	Rehabilitasi dan pemeliharaan LPJU Terminal Handil II				
6	Perencanaan rehabilitasi dan pemeliharaan LPJU di Kec Samboja	-	-	-	-
7	Pemeliharaan dan revitalisasi LPJU Jembatan Kuaia Samboja dan sekitarnya (Penambahan ornamen lampu hias)	-	-	-	-
8	Pemeliharaan dan revitalisasi LPJU Kel. Sungai Seluang Samboja (Penambahan ornamen lampu hias)	-	-	-	-
9	Pengadaan bola lampu LPJU (Lampu led)	-	-	-	-
10	-Pembuatan Box KWH Meter LPJU Tenggarong Seberang	-	-	-	-
11	Pengadaan tiang LPJU, kabel jaringn, konektor, ornamen serta komponen LPJU lainnya	-	-	-	-
XI	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Prosentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C/ IKM	100	575.000.000,00
36	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kec M. Muntai	Jumlah Dokumen	1	275.000.000,00
1	Perencanaan/Fs pembangunan terminal muara muntai				275.000.000,00

37	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Kembangkan	1	200.000.000,00
1	<i>DED pengembangan sarana dan prasarana terminal tangga arung</i>		<i>Jumlah dok</i>		<i>200.000.000,00</i>
38	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Tenggarong dan kota bangun	Jumlah Bangunan Terminal	2	100.000.000,00
1	<i>Perencanaan rehabilitasi terminal handil II kec. M. Jawa</i>	-	-	-	-
XII	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Prosentase Peningkatan Pengelolaan Perpajakan	100	300.000.000,00
39	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Kukar	Jumlah kegiatan ijin penyelenggaraan parkir yang diterbitkan	1	100.000.000,00
40	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Kecamatan	Jumlah Lokasi Kegiatan Pengawasan	16 Kecamatan	200.000.000,00
XIII	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Prosentase Kepemilikan Buku Uji Angkutan Umum	100	700.000.000,00

41	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
1	<i>Pengadaan alat exle play detector, compresor dan server</i>	-	-	-	-
42	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
1	<i>Diklat Teknis dan kompetensi PKB</i>	-	-	-	-
43	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Jumlah lokasi Kegiatan	8	50.000.000,00
44	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Jumlah Bukti Lulus Uji (BLU - E)	13,400	350.000.000,00
45	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana PKB yang dikembangkan	28	300.000.000,00
1	<i>Kalibrasi peralatan dan mesin PKB</i>			15	-
2	<i>Pemeliharaan hardware/perangkat komputer/alat penunjang SIM PKB</i>			11	-
3	<i>Pemeliharaan/pengembangan/update software/aplkasi SIM PKB</i>			2	-
4	<i>Pemeliharaan / pengembangan bangunan PKB (pembangunan kios/toko sparpert</i>			-	-

XIV	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	1.225.835.000,00
46	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Lokasi Kegiatan	15 Kecamatan	250.000.000,00
47	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kab. Kukar	Jumlah perlengkapan jalan yang diadakan, dipasang dan dipelihara	200	775.835.000,00
1	<i>Pengadaan dan perawatan Marka Jalan, Zona Selamat Sekolah, Zebra Cross</i>	-	-	-	-
2	<i>Pembuatan penutup jalan kegiatan car free day</i>	-	-	-	-
3	<i>Pembuatan papan nama jalan</i>	-	-	-	-
4	<i>Pembuatan rambu rawan laka</i>	-	-	-	-
5	<i>Pembuatan rambu larangan parkir</i>	-	-	-	-
6	<i>Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)</i>	-	-	-	-
7	<i>Pengadaan dan pemasangan Rambu lalin</i>	-	-	-	-
8	<i>Pemeliharaan rambu</i>	-	-	-	-
9	<i>Pemeliharaan zebra cross</i>	-	-	-	-
10	<i>Pengadaan Barrier</i>	-	-	-	-
11	<i>Pengadaan dan pemasangan warning light</i>	-	-	-	-

48	Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	-	Jumlah Lokasi kegiatan	-	-
1	<i>Pengawasan dan penertiban kegiatan erau, natal, tahun baru dan even-even daerah lainnya</i>	-		-	-
49	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah kegiatan	4	200.000.000,00
1	<i>Kegiatan pengendalian LLAJ di pendamaran</i>			-	-
XV	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	20	200.000.000,00
50	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kukar	Jumlah kegiatan	1	100.000.000,00
1	<i>Kegiatan Penertiban/ Rajia odol</i>			-	-
51	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan	1	100.000.000,00
XVI	Penetapan Rencana Umum jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Penetapan Rencana Umum jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) daerah	20	350.000.000,00

			Kabupaten/Kota		
52	Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah dokumen	1	350.000.000,00
1	<i>Studi Konektifitas pengembangan pelayanan angkutan penumpang umum perintis di wilayah Kab Kukar</i>				
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Prosentase Peningkatan Pengelolaan Pelayaran	52	1.679.165.000,00
XVII	Penerbitan Izin Usaha Angkutan laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Di Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Jumlah Usaha Angkutan Laut Yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Daerah kabupaten	100	200.000.000,00
53	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan Kabupaten/kota	Kecamatan	jumlah lokasi kegiatan	6 Kecamatan	200.000.000,00
XVIII	Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau		Cakupan DLKR/DLKP Diwilayah Pelabuhan Sungai Dan Danau	50	500.000.000,00

54	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai Dan Danau	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1	500.000.000,00
XIX	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian pelabuhan Pengumpan Lokal		Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	25	430.000.000,00
55	Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal	Kec Anggana	Jumlah pelabuhan Pengumpan Lokal Yang Dibangun	1	430.000.000,00
XX	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	399.165.000,00
56	Pembangunan pelabuhan sungai dan danau	Kab. Kukar	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Yang yang dibangun	2	100.000.000,00
1	Pembuatan Dermaga RT. 20 Salo Dere, Desa Tani baru Kec. Anggana	Kec. Anggana	Jumlah unit	1	100.000.000,00
2	Peningkatan Dermaga Tambat Kapal Nelayan Desa Kutai Lama Kec. Anggana		Jumlah unit	-	-
3	Peningkatan Dermaga Tambat Perahu RT. 11 Desa Sidomulyo Kec. Anggana		Jumlah unit	-	-
4	Perencanaan pembangunan dermaga tambat labuh (jembatan martadipura)	-	-	-	-
57	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Kec. M. mutai dan Kembang Janggut	Jumlah pelabuhan Sungai dan Danau Yang dipelihara	2	200.000.000,00
1	Pemeliharaan/rehab dermaga Muara Muntai	Kec. M. Muntai		1	100.000.000,00
2	Pemeliharaan/rehab dermaga Kembang janggut	Kec. Kembang Janggut		1	100.000.000,00

3	Rehab Dermaga Sebulu	-	-	-	-
4	Pemeliharaan/rehab dermaga aji imbut	-	-	-	-
5	Pemeliharaan/rehab dermaga Muara Aloh	-	-	-	-
6	Pemeliharaan/rehab dermaga Jantur selatan	-	-	-	-
7	Pemeliharaan/rehab dermaga Kutai Lama	-	-	-	-
8	Pemeliharaan/rehab dermaga pela	-	-	-	-
58	Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Kecamatan	Jumlah Lokasi Kegiatan Pengawasan	5 (Kecamatan)	99.165.000,00
XXI	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal		Cakupan Pengelolaan TUKS DiDalam Kawasan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	100	150.000.000,00
59	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal	Kecamatan	Jumlah Lokasi Kegiatan Pengawasan	7 (Kecamatan)	150.000.000,00
Jumlah					37.556.326.672,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan

Pada Tahun 2022 telah dilakukan Penyusunan Renstra 2022-2026 yang menghasilkan Perubahan Sasaran Strategis dan Indikatornya, maka pada tahun 2022 terjadi perubahan pada sasaran strategis dan indikator dalam melakukan penilaian dan penyusunan pelaporan, Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022, maka dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.1.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengetahui capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2022, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Renstra 2022	Realisasi	Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)
Sasaran 1 Renstra:							
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perhubungan	1 Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan dari Dinas Perhubungan	78	83,84	107%	Tercapai melebihi target
Sasaran 2 Renstra:							
2	Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana serta Fasilitas Perhubungan	1 Prosentase ketersediaan prasarana Jalan	Jumlah (komulatif) prasarana Jalan yang tersedia dibagi jumlah prasarana jalan yang	29,25%	29,25%	100,00%	Tercapai sesuai target
		2 Prosentase ketersediaan perlengkapan Jalan	Jumlah (komulatif) perlengkapan Jalan yang tersedia dibagi jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia dikali 100%	1,16%	1,16%	100,00%	Tercapai sesuai target
		3 Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah (komulatif) Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal yang tersedia dibagi jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan	27%	27%	100,00%	Tercapai sesuai target
		4 Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah (komulatif) Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau Dan Penyeberangan yang tersedia dibagi jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau Dan	25%	25%	100,00%	Tercapai sesuai target
Sasaran 3 Renstra:							
3	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kinerja Aparatur	1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Hasil evaluasi LKJP oleh Inspektorat tiap tahunnya	82	77,90	95,00%	Belum mencapai target Nilai LKJP 2022

3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Untuk mengetahui Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2022, maka dibuatlah daftar perbandingan sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Daftar Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Keterangan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Sasaran sesuai RPJMD:</u>						
Meningkatnya aksesibilitas dan Konektifitas wilayah	1	Indeks aksesibilitas wilayah	84,18	100	119%	Tercapai melebihi target
<u>Sasaran 1 Renstra:</u>						
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perhubungan	1	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	83,84	107%	Tercapai melebihi target
<u>Sasaran 2 Renstra:</u>						
Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana serta Fasilitas Perhubungan	1	Prosentase ketersediaan prasarana Jalan	29,25%	29,25%	100%	Tercapai sesuai target
	2	Prosentase ketersediaan perlengkapan Jalan	1,16%	1,16%	100%	Tercapai sesuai target
	3	Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	27%	27%	100%	Tercapai sesuai target
	4	Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	25%	25%	100%	Tercapai sesuai target
<u>Sasaran 3 Renstra:</u>						
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kinerja Aparatur	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	82	77,90	95%	Belum mencapai target Nilai LKJIP 2021

3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022

Untuk mengetahui Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022, maka dibuatlah data perbandingan sebagai berikut :

Tabel 3.1.3
Daftar Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021			
		Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sasaran sesuai RPJMD:					
Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan	1 Cakupan aksesibilitas antar wilayah (IKU BAB 5 RPJMD)	100%	100%	100%	Tercapai sesuai target
Sasaran 1 Renstra:					
Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	80	74,44	93%	Belum mencapai target Nilai LKjIP 2020
	2 Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan	100%	100%	100%	Tercapai sesuai target
	3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	78,53	102%	Tercapai melebihi target
Sasaran 2 Renstra:					
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	1 Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	100%	100%	100%	Tercapai sesuai target
Sasaran 3 Renstra:					
Meningkatnya Penerimaan Retribusi Sektor Perhubungan	1 Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan	100%	105%	105%	Tercapai melebihi target
	2 Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji	100%	61%	61%	Belum mencapai target

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022			
		Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sasaran sesuai RPJMD:					
Meningkatnya aksesibilitas dan Konektivitas wilayah	1 Indeks aksesibilitas wilayah	84,18	100	119%	Tercapai melebihi target
Sasaran 1 Renstra:					
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perhubungan	1 Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	83,84	107%	Tercapai melebihi target
Sasaran 2 Renstra:					
Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana serta Fasilitas Perhubungan	1 Prosentase ketersediaan prasarana Jalan	29,25%	29,25%	100%	Tercapai sesuai target
	2 Prosentase ketersediaan perlengkapan Jalan	1,16%	1,16%	100%	Tercapai sesuai target
	3 Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	27%	27%	100%	Tercapai sesuai target
	4 Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	25%	25%	100%	Tercapai sesuai target
Sasaran 3 Renstra:					
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kinerja Aparatur	1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	82	77,90	95%	Belum mencapai target Nilai LKjIP 2021

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan / beberapa tahun yang lalu. Selain itu juga evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dikarenakan adanya Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan 2021 – 2026 yang melakukan perombakan di dalam Sasaran Strategis dan Indikatornya maka untuk melakukan analisis pembandingan dengan tahun sebelumnya tidak berurutan sasarannya akan tetapi disesuaikan dengan indikatornya.

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara input yang digunakan dan capaian output dan outcome yaang dihasilkan, berikut analisa faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong tercapai atau tidaknya suatu target sasaran.

3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran RPJMD

Sasaran sesuai RPJMD **“Meningkatnya aksesibilitas dan Konektifitas wilayah ”** mempunyai indikator kinerja sasaran, yaitu: Indeks aksesibilitas wilayah . Adapun capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Indikator sesuai RPJMD: **“Indeks aksesibilitas wilayah**

a. **Pengukuran Capaian Kinerja**

Pada kondisi sebelumnya untuk tahun 2021 telah terealisasi sebesar 100% dan pada tahun 2022 pada BAB 5 Dokumen RPJMD 2021-2026

ditargetkan tercapai sebesar 84,18%, dan setelah evaluasi capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 realisasi kinerja meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 100%, ini berarti pada tahun 2022 terjadi peningkatan kinerja, namun sebenarnya target kinerja tahun 2022 tersebut telah tercapai melebihi target pada tahun 2021. pada tahun 2022 target dari RPJMD adalah sebesar 84,18% dan terealisasi sebesar 100%

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah (komulatif) Kecamatan yang memiliki fasilitas perhubungan yang layak} \times 100\%}{\text{jumlah seluruh Kecamatan}}$$

(Jumlah (komulatif) Kecamatan yang memiliki sarana, prasarana, fasilitas perhubungan yang layak dibagi jumlah seluruh Kecamatan dikali 100%)

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Target indikator kinerja tahun 2022 sebesar 84,18% dicapai dengan realisasi kinerja sebesar 100%, maka besarnya capaian kinerja adalah 119% atau $(84,18\%/100\% \times 100\% = 119\%)$. Capaian indikatornya yaitu “Indeks aksesibilitas wilayah” memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian untuk hasil capaian Indikator 1 mendapat interpretasi **“Sangat Memuaskan”**.

3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 Renstra

Sasaran 1 (Renstra) **“Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perhubungan”** mempunyai indikator kinerja sasaran, yaitu: Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Indikator : “Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Untuk indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, untuk tahun 2022 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di bidang Perhubungan ditargetkan dengan nilai “78” atau dengan interpretasi “Baik”. Adapun unit pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai

Kartanegara yang akan dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Pelabuhan
3. Parkir
4. Terminal

Metode pelaksanaan dan penyusunan hasil survey kepuasan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan tahapan sebagai berikut:

1.3.1. Persiapan Survey

1. Penyiapan Bahan Survey

- a. Kuesioner: sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan, dengan bagian kuesioner secara umum, terbagi dalam:
 - 1) Bagian Pertama: berisikan judul kuesioner dan nama instansi yang dilakukan survei.
 - 2) Bagian Kedua: berisikan identitas responden, antara lain: jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Identitas dipergunakan untuk menganalisis profil responden kaitan dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang diperoleh.
 - 3) Bagian Ketiga: berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup), sedangkan jawaban tidak terstruktur (pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan dengan jawaban bebas, dimana responden dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik dan apresiasi.
- b. Bentuk Jawaban: bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat

kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) baik, diberi nilai 3;
- 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

2. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

a. Penetapan Jumlah Responden: Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Adapun jumlah responden yang ditentukan dalam kegiatan survey ini adalah sebanyak 100 (seratur) orang pengguna layanan.

b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

c. Pelaksanaan Pengumpulan Data: melalui pengisian kuesioner untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan.

1.3.2. Langkah-Langkah Pengolahan Data

1. Pengukuran Skala Likert (Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai)

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

Rumus 1:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Rumus 2:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Rumus 3:

$$SKM \text{ Unit pelayanan} \times 25$$

Tabel 3.5

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat baik

Sumber: PERMENPAN-RB Nomor 14 tahun 2017

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Untuk indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, bahwa sesuai dengan rencana target kinerja yang dimuat pada dokumen Renstra tahun 2022 adalah 78%, dengan interpretasi “Baik”. Kemudian guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat (pengguna jasa layanan) Dinas Perhubungan tahun 2022, telah dilakukan survey kepuasan masyarakat dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.6 Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai
1	Persyaratan	290
2	Prosedur	278
3	Waktu pelayanan	294

4	Biaya/Tarif	250
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	287
6	Kompetensi pelaksana	300
7	Perilaku pelaksana	314
8	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	284
9	Sarana dan Prasarana	325

Sumber data diolah 2022

Tabel 3.6 tersebut diatas, apabila dilihat NRR per unsurnya adalah hasil Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan dibagi jumlah responden (86). Adapun NRR per Unsur Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Nilai Rata-Rata per Unsur Pelayanan
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai
1	Persyaratan	3,37
2	Prosedur	3,23
3	Waktu pelayanan	3,42
4	Biaya/Tarif	2,91
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,34
6	Kompetensi pelaksana	3,49
7	Perilaku pelaksana	3,65

8	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	3,30
9	Sarana dan Prasarana	3,78

Sumber data diolah 2022

Tabel 3.7 apabila dilihat dari NRR Tertimbang per Unsur Pelayanan, maka NRR per Unsur Pelayanan dikalikan dengan nilai penimbang yang sama yaitu 0,11. Adapun NRR Tertimbang per Unsur Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Nilai Rata-Rata Tertimbang per Unsur Pelayanan
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai
1	Persyaratan	0,37
2	Prosedur	0,36
3	Waktu pelayanan	0,38
4	Biaya/Tarif	0,32
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	0,37
6	Kompetensi pelaksana	0,38
7	Perilaku pelaksana	0,40
8	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	0,36
9	Sarana dan Prasarana	0,42
	Jumlah	3.35

Sumber data diolah 2022

Selanjutnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapatkan sebagai hasil pengalihan antara hasil penjumlahan NRR Tertimbang (sebagaimana hasil pada Tabel 2.5) dengan nilai dasar 25.

Dengan demikian nilai IKM yang diperoleh 3,35 adalah; $3,35 \times 25$ (nilai dasar) = 83,84 Nilai tersebut kemudian dikonversi ke dalam tingkat Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, dengan pedoman sebagai berikut:

Tabel 3.9 Konversi Indeks Pelayanan
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
88,31 – 100,00	A	Sangat baik
78,81 – 88,30	B	Baik
65,00 – 78,00	C	Kurang baik
25,00 – 64,99	D	Tidak baik

Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

Sehingga nilai IKM yang mencapai **83,84** jika dikonversikan dengan pedoman sebagaimana tabel 3.9 maka Mutu Pelayanan adalah B dan Kinerja Baik.

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 Renstra

Sasaran 2 Renstra “**Meningkatnya Kapasitas Sarana, Serta Fasilitas Perhubungan**” mempunyai **4 (empat)** indikator kinerja sasaran, yaitu:

1. Indikator 1: “Prosentase Ketersediaan Prasana Jalan”

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Untuk indikator 1, yaitu: “Prosentase Ketersediaan Prasarana Jalan”, bahwa sesuai dengan rencana target kinerja yang dimuat pada dokumen Renstra, pada tahun 2022 ditargetkan tercapai sebesar 29,25%, dan setelah evaluasi capaian kinerja sasaran pada 2022 kondisinya adalah sebesar 100%, ini berarti pada tahun 2022 telah mencapai target capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kumulatif prasarana jalan yang tersedia}}{\text{Jumlah prasarana jalan yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$$

(Jumlah (kumulatif) prasarana Jalan yang tersedia dibagi jumlah prasarana jalan yang seharusnya tersedia dikali 100%)

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Target indikator kinerja tahun 2022 sebesar 29,25% dengan realisasi kinerja adalah sebesar 29,25%, maka besarnya capaian kinerja adalah 100% atau $(29,25\% / 29,25\% \times 100\% = 100\%)$. Capaian indikatornya yaitu *“Prosentase ketersediaan prasarana jalan”* telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian untuk hasil capaian Indikator 1 mendapat interpretasi **“Sangat Memuaskan”**.

2. Indikator 2: “Prosentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan”

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Untuk indikator 2, yaitu: *“Prosentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan”*, bahwa sesuai dengan rencana target kinerja yang dimuat pada dokumen Renstra, pada tahun 2022 ditargetkan tercapai sebesar 1,16%, dan setelah evaluasi capaian kinerja sasaran pada 2022 kondisinya adalah sebesar 100%, ini berarti pada tahun 2022 telah mencapai target capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kumulatif Perlengkapan jalan yang tersedia}}{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$$

(Jumlah (kumulatif) Perlengkapan Jalan yang tersedia dibagi jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia dikali 100%)

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Target indikator kinerja tahun 2022 sebesar 1,16% dengan realisasi kinerja adalah sebesar 1,16%, maka besarnya capaian kinerja adalah 100% atau $(1,16\% / 1,16\% \times 100\% = 100\%)$. Capaian indikatornya yaitu *“Prosentase ketersediaan perlengkapan jalan”* telah tercapai sesuai target

yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian untuk hasil capaian Indikator 2 mendapat interpretasi **“Sangat Memuaskan”**.

3. Indikator 3: “Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal”

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Untuk indikator 3, yaitu: “Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal”, bahwa sesuai dengan rencana target kinerja yang dimuat pada dokumen Renstra, pada tahun 2022 ditargetkan tercapai sebesar 27%, dan setelah evaluasi capaian kinerja sasaran pada 2022 kondisinya adalah sebesar 100%, ini berarti pada tahun 2022 telah mencapai target capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Komulatif SaPras Pelabuhan pengumpan Lokal}}{\text{Jumlah Sapras Pelabuhan Pengumpan Lokal yg seharusnya tersedia}} \times 100\%$$

(jumlah (komulatif) Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal yang tersedia dibagi jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal yang seharusnya tersedia dikali 100%)

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Target indikator kinerja tahun 2022 sebesar 27% dengan realisasi kinerja adalah sebesar 27%, maka besarnya capaian kinerja adalah 100% atau $(27\% / 27\% \times 100\% = 100\%)$. Capaian indikatornya yaitu “Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal” telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian untuk hasil capaian Indikator 3 mendapat interpretasi **“Sangat Memuaskan”**.

4. Indikator 4: “Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan”

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Untuk indikator 4, yaitu: “Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan”, bahwa sesuai dengan rencana target kinerja yang dimuat pada dokumen Renstra, pada

tahun 2022 ditargetkan tercapai sebesar 25%, dan setelah evaluasi capaian kinerja sasaran pada 2022 kondisinya adalah sebesar 100%, ini berarti pada tahun 2022 telah mencapai target capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Komulatif SaPras Pelabuhan Sungai, Danau \& Penyeberangan} \times 100\%}{\text{Jumlah Saprass Pelabuhan Sungai, Danau \& Penyeberangan yg seharusnya}}$$

tersedia

(Jumlah (komulatif) Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang tersedia dibagi jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang seharusnya tersedia dikali 100%)

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Target indikator kinerja tahun 2022 sebesar 25% dengan realisasi kinerja adalah sebesar 25%, maka besarnya capaian kinerja adalah 100% atau $(25\% / 25\% \times 100\% = 100\%)$. Capaian indikatornya yaitu “*Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan*” telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian untuk hasil capaian Indikator 4 mendapat interpretasi “**Sangat Memuaskan**”.

3.2.4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 Renstra

Sasaran 3 Renstra “**Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kinerja Aparatur**” mempunyai indikator kinerja sasaran, yaitu: Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

Untuk hasil evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 adalah menunggu hasil penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan pada tahun 2023 sekarang ini, namun dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan telah ditetapkan target capaian kinerja untuk nilai akuntabilitas kinerja pada tahun 2022 adalah **82 (A)**.

Adapun pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil evaluasi AKIP tahun 2014 dengan nilai **68,60** dengan kategori **B** (Baik, perlu sedikit perbaikan);
- 2) Hasil evaluasi AKIP tahun 2015 dengan nilai **75,15** dengan kategori **BB** (Sangat Baik);
- 3) Hasil evaluasi AKIP tahun 2016 dengan nilai **76,78** dengan kategori **BB** (Sangat Baik)
- 4) Hasil evaluasi AKIP tahun 2017 dengan nilai **77,83** dengan kategori **BB** (Sangat Baik)
- 5) Hasil evaluasi AKIP tahun 2019 dengan nilai **67,10** dengan kategori **B** (Baik)
- 6) Hasil evaluasi AKIP tahun 2020 dengan nilai **74,44** dengan kategori **BB** (Sangat Baik)
- 7) Hasil evaluasi AKIP tahun 2021 dengan nilai **77,90** dengan kategori **BB** (Sangat Baik)

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja yang cukup signifikan dan pada tahun 2019 terjadi penurunan hasil penilaian hal tersebut dipengaruhi karena Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun tersebut melakukan pembenahan baik mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/ kinerja organisasi, kemudian pada tahun 2020 sampai dengan 2021 ada peningkatan capaian kinerja.

3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak terlepas dari 3 (tiga) sumber daya yang utama, yaitu:

Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Aset, dan Sumber Daya Keuangan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud adalah semua Karyawan/ Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara baik yang berstatus PNS maupun yang berstatus Honorer/ Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sumber Daya Aset terdiri dari Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, serta dokumen-dokumen penunjang yang ada digunakan dan dimanfaatkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian Sumber Daya Keuangan, yaitu pendanaan yang berasal dari dana APBD Pemerintah Daerah, APBD Provinsi melalui BANKEU yang dianggarkan pada setiap tahunnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai efisiensi penggunaan sumber daya yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:

3.3.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Aparatur Dinas Perhubungan terdiri dari 136 orang PNS ditambah dengan tenaga pembantu non PNS/ Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 253 orang termasuk tenaga lapangan seperti di Dermaga dan Terminal di beberapa Kecamatan-Kecamatan tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 pada Dinas Perhubungan, SDM yang berperan sangat penting dalam teknis pelaksanaannya, adalah sebagai berikut:

1) Pengguna Anggaran (PA);

Berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.

Kemudian pada Dinas Perhubungan, yang memegang peranan Pengguna Anggaran adalah Pejabat Eselon II, yaitu Kepala Dinas Perhubungan, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya

disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

Untuk pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 pada Dinas Perhubungan, yang diberi kewenangan sebagai KPA adalah Pejabat Eselon III yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yaitu terdiri dari 1 (Satu) orang sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang yang membidangi Perhubungan Darat, ASDP, Perhubungan Laut, Pengendalian dan Operasional.

3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang memiliki tugas dan kewenangan, diantaranya yaitu: 1) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yaitu: menyusun spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan membuat rancangan Kontrak; 2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 3) menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; 5) mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 6) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. 7) membuat dan menandatangani Berita Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 8) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam hal ini untuk membantu PPK dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2022 di Dinas Perhubungan, telah dimanfaatkan beberapa SDM Aparatur Perhubungan untuk ditetapkan sebagai PPTK yang ditetapkan dengan Keputusan PPK, yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari para Pejabat Eselon IV (Kasi dan Kasubbag), dan beberapa staf yang memang berkompeten untuk menjadi PPTK.

5) Unit Layanan Pengadaan;

Berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pada tahun 2022 telah dibentuk organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang masih melekat pada Bagian

Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6) Panitia/ Pejabat Pengadaan;

Berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, yaitu bertugas untuk melaksanakan pengadaan untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

7) Pengurus Barang Pengguna ;

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan memiliki 1 (satu) orang Pegawai yang bertugas sebagai Pengurus Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tabel 3.3.1

Daftar penggunaan SDM/ Aparatur Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022

No.	Jabatan	Bidang Tugas	Jumlah	Keterangan
1	Pengguna Anggaran (PA)	Untuk 1 (satu) SKPD	1	Kepala Dinas
2	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Bidang Sekretariat	5	
		Bidang Perhubungan Darat		
		Bidang ASDP		
		Bidang Perhubungan Laut		
		Bidang Pengendalian dan Operasional		
3	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		6	1 orang PNS Gol.III untuk Bidang Sekretariat, Seluruh Kepala Bidang menjabat KPA dan merangkap sebagai PPK pada masing-masing bidang
4	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Bidang Sekretariat dan Bidang Darat	1	
		Bidang Laut , ASDP,PKB dan Dalops	1	
5	Pengurus Barang Pengguna	Untuk 1 (satu) SKPD	1	

3.3.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Aset

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2022, Dinas Perhubungan memanfaatkan aset diantaranya berupa Gedung dan Bangunan,

Peralatan dan Mesin seperti: Kendaraan dan peralatan kantor, serta peralatan kantor lainnya dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan. Secara lebih jelas nilai sumber daya asset Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.2
Jumlah Nilai Aset Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2022

No.	Jenis Aset	2021	2022
1	Piutang Lainnya	-	-
2	Persediaan	1.285.823.070	1.050.993.444
2	Tanah	3.176.929.400	3.176.929.400
3	Peralatan dan Mesin	38.926.215.232	41.382.145.979
4	Gedung dan Bangunan	611.074.874.774	610.995.440.456
5	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.886.287.492	10.886.287.492
6	Aset Tetap Lainnya	-	-
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	100.346.953.338	100.346.953.338
8	Akumulasi Penyusutan	-70.754.004.822	- 85.916.545.749
9	Aset Tidak Berwujud	26.987.908.770	26.987.908.770
10	Aset Lain-lain	2.516.900.035	2.846.632.356
Jumlah		724.447.887.289	711.756.745.485

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kab. Kukar Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai aset terbesar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pada kategori jenis aset: “Gedung dan Bangunan”, dari total keseluruhan aset, dan selanjutnya adalah aset “Kontruksi Dalam Pengerjaan” .

3.3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Untuk pembiayaan program dan kegiatan tahun 2022 adalah menggunakan sumber daya keuangan yang berasal dari dana APBD Pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 baik APBD murni maupun APBD Perubahan yang jumlah anggarannya secara keseluruhan adalah Rp. 76.318.995.388,- (Termasuk Belanja Tidak Langsung/Gaji, tunjangan, dll), kemudian terealisasi sebesar Rp. 73.037.416.929,- atau sebesar 95,70%. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.281.578.459,-. Adapun jumlah anggaran keseluruhan tersebut adalah untuk membiayai 3 Program dengan 16 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan, serta termasuk untuk pembayaran gaji, tunjangan, dll bagi PNS.

3.4 Realisasi Anggaran SKPD

Untuk pembiayaan program dan kegiatan tahun 2022 adalah menggunakan sumber daya keuangan yang berasal dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 baik APBD murni maupun APBD Perubahan serta penyusutan yang jumlah anggarannya secara keseluruhan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 77.218.995.388,-

Rincin alokasi dan realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.1

Jumlah Realisasi Anggaran tahun 2022

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi (pembayaran gaji, tunjangan, dll bagi PNS dan Belanja Barang dan Jasa)	40.470.125.096,00	36.380.017.751	89,89%
2	Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Aset Lainnya)	36.748.870.292,00	36.655.733.278	99,75%
Jumlah		77.218.995.388,00	73.035.751.029	94,58%

Sumber: Laporan Keuangan Dinas perhubungan Kab.Kukar TA.2022

Tabel 3.4.2
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2022

No	Program	Realisasi Anggaran TA.2020			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	65.052.180.407	61.884.181.189	95,13%	3.167.999.218
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.091.814.981	9.036.746.953	99,39%	55.068.028
3	Program Pengelolaan Pelayaran	2.175.000.000	2.116.488.787	97,31%	58.511.213
Jumlah Pagu Program		76.318.995.388	73.037.416.929	95,70%	3.281.578.459

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kab.Kukar TA.2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran adalah sebesar 95,70%. Secara lebih rinci mengenai realisasi anggaran (pagu dana) yang digunakan dan yang telah digunakan (realisasi) untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan Perjanjian Kerja tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.3
Realisasi Anggaran Untuk Mewujudkan Kinerja
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022			Program	Realisasi Anggaran TA.2022			Sisa Anggaran (Rp)
		Target Kinerja	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sasaran sesuai RPJMD:									
Meningkatnya aksesibilitas dan Konektivitas wilayah	1 Indeks aksesibilitas wilayah	84,18	100	119%	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	65.052.180.407	61.884.181.189	95%	3.167.999.218
Sasaran 1 Renstra:					2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.091.814.981	9.036.746.953	99%	55.068.028
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perhubungan	1 Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	83,84	107%	3 Program Pengelolaan Pelayaran	2.175.000.000	2.116.488.787	97%	58.511.213
Sasaran 2 Renstra:					Jumlah Pagu Program Indikator 1 s.d 3 Sasaran Renstra	76.318.995.388	73.037.416.929	95,70%	3.281.578.459

Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana serta Fasilitas Perhubungan	1	Prosentase ketersediaan prasarana Jalan	29,25%	29,25%	100%
	2	Prosentase ketersediaan perlengkapan Jalan	1,16%	1,16%	100%
	3	Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	27%	27%	100%
	4	Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	25%	25%	100%
Sasaran 3 Renstra:					
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kinerja Aparatur	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	82	77,90	95%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan penggunaan anggaran terhadap target Indikator sasaran, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran sesuai Bab 5 RPJMD “Meningkatnya aksesibilitas dan Konektifitas wilayah”

Tingkat ketercapaian sasaran sesuai RPJMD Kab.Kukar tahun 2021-2026 ini diukur dengan indikator: “*Indeks aksesibilitas wilayah (IKU BAB 5 RPJMD)*”. Pada tahun 2022 indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 (Satu) program, yaitu: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 9.091.814.981,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.036.746.953,-atau dengan prosentase sebesar 99%. Kemudian capaian kinerja dari Target indikator sasaran adalah sebesar 84,18%, sehingga dapat dijabarkan bahwa dengan menggunakan anggaran sebesar 99% dapat meraih capaian kinerja sasaran sebesar 100%.

2. Sasaran 1 Renstra “Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perhubungan”

Tingkat ketercapaian sasaran 1 Renstra ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

a. ***Indikator 1: Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat***

Penggunaan anggaran untuk pencapaian target kinerja pada sasaran 1 Renstra ini adalah dengan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 65.052.180.407,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.884.181.189,- atau dengan capaian prosentase sebesar 95%. Bahwa dengan prosentase realisasi anggaran tersebut, telah menghasilkan kinerja, yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 83,84 (BAIK).

3. Sasaran 2 Renstra “Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana serta Fasilitas Perhubungan”

Tingkat ketercapaian sasaran 2 Renstra ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

a. **Indikator 1: Prosentase ketersediaan prasarana Jalan.**

Pada tahun 2022 indikator sasaran ini dilaksanakan melalui “Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)” dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 9.091.814.981,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.036.746.953,- atau dengan prosentase sebesar 99%. Kemudian capaian kinerja dari Target indikator sasaran adalah sebesar 29,25%, sehingga dapat dijabarkan bahwa dengan menggunakan anggaran sebesar 99% dapat meraih capaian kinerja sasaran sebesar 100%;

b. **Indikator 2: Prosentase ketersediaan Perlengkapan Jalan.**

Pada tahun 2022 indikator sasaran ini dilaksanakan melalui “Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)” dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 9.091.814.981,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.036.746.953,- atau dengan prosentase sebesar 99%. Kemudian capaian kinerja dari Target indikator sasaran adalah sebesar 1,16%, sehingga dapat dijabarkan bahwa dengan menggunakan anggaran sebesar 99% dapat meraih capaian kinerja sasaran sebesar 100%;

c. **Indikator 3: Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal.**

Pada tahun 2022 indikator sasaran ini dilaksanakan melalui “Program Pengelolaan Pelayaran” dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 2.175.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.116.488.787,- atau dengan prosentase sebesar 97%. Kemudian capaian kinerja dari Target indikator sasaran adalah sebesar 27%, sehingga dapat dijabarkan bahwa dengan menggunakan anggaran sebesar 97% dapat meraih capaian kinerja sasaran sebesar 100%;

d. **Indikator 4: Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan.**

Pada tahun 2022 indikator sasaran ini dilaksanakan melalui “Program Pengelolaan Pelayaran” dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 2.175.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.116.488.787,- atau dengan prosentase sebesar 97%. Kemudian capaian kinerja dari Target

indikator sasaran adalah sebesar 25%, sehingga dapat dijabarkan bahwa dengan menggunakan anggaran sebesar 97% dapat meraih capaian kinerja sasaran sebesar 100%;

4. Sasaran 3 Renstra “Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kinerja Aparatur”

Tingkat ketercapaian sasaran 3 Renstra ini diukur dengan 1 (Satu) indikator kinerja, yaitu:

a. Indikator 1: Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

Penggunaan anggaran untuk pencapaian target kinerja pada sasaran 1 Renstra ini adalah dengan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 65.052.180.407,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.884.181.189,- atau dengan capaian prosentase sebesar 95%. Bahwa dengan prosentase realisasi anggaran tersebut, telah menghasilkan kinerja, yaitu: Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2021 dengan nilai 77,90 (SANGAT BAIK).



BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Keberhasilan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya bidang perhubungan, dan juga sebagai bahan untuk pengambilan keputusan pada perencanaan berikutnya.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 7 indikator kinerja sebesar 103%. Dari 7 indikator sasaran, hanya terdapat 1 indikator yang capaian kinerjanya belum mencapai target. Secara lebih jelas capaian kinerja masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Masing-Masing Sasaran Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Keterangan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Sasaran sesuai RPJMD:</u>						
Meningkatnya aksesibilitas dan Konektifitas wilayah	1	Indeks aksesibilitas wilayah	84,18	100	119%	Tercapai melebihi target
<u>Sasaran 1 Renstra:</u>						
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perhubungan	1	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	83,84	107%	Tercapai melebihi target
<u>Sasaran 2 Renstra:</u>						
Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana serta Fasilitas Perhubungan	1	Prosentase ketersediaan prasarana Jalan	29,25%	29,25%	100%	Tercapai sesuai target
	2	Prosentase ketersediaan perlengkapan Jalan	1,16%	1,16%	100%	Tercapai sesuai target
	3	Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	27%	27%	100%	Tercapai sesuai target
	4	Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	25%	25%	100%	Tercapai sesuai target
<u>Sasaran 3 Renstra:</u>						
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kinerja Aparatur	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	82	77,90	95%	Belum mencapai target Nilai LKjIP 2021
Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran					103%	

4.2. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara terkait beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu pada Sasaran Renstra 3 Indikator yang belum mencapai target kinerja, yaitu:

1. Sasaran 3 Renstra: pada indikator Predikat AKuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan dengan prosentase capaian kinerja sebesar 95%.

Belum tercapainya target capaian kinerja adalah disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Mekanisme Pengumpulan data Kinerja belum didukung pedoman atau SOP;
- b. Pengumpulan data Kinerja atas Rencana Kasi telah dilakukan tetapi belum memuat realisasinyasecara berkala (bulanan/triwulan/semester);
- c. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat Esselon II, III, IV dan Staf belum dikaitkan dengan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment;
- d. IKU belum direviu secara berkala;
- e. Pengukuran Kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala;
- f. Laporan kinerja belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan;
- g. Evaluasi Program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan;
- h. Evaluasi Program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
- i. Hasil Evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

4.3. Langkah-Langkah di Masa Mendatang

Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tetap berupaya untuk dapat mencapai semua target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) walaupun sebagian besar sudah tercapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Mengingat masih ada indikator yang belum mencapai target, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara ke depan harus menyiapkan strategi dan langkah-langkah perbaikan. Guna lebih meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang, ada banyak langkah-langkah atau strategi yang akan dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa mendatang, yaitu sebagai berikut:

- a. Terus memperkuat sistem perencanaan program kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, serta dokumen perencanaan daerah yang mendasari penyelenggaraan pembangunan di bidang perhubungan agar lebih mendasari dan memberikan kejelasan dalam pengusulan program dan kegiatan pada APBD, APBD Provinsi serta APBN bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Memanfaatkan dokumen perencanaan, FS, DED, hasil kajian, hasil studi-studi yang telah disusun sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan serta fasilitas lalu lintas jalan maupun sungai dan laut;
- c. Mengoptimalkan fungsi prasarana dan fasilitas perhubungan yang sudah ada di beberapa Kecamatan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang memadai;
- d. Terus berupaya mengoptimalkan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas di seluruh wilayah Kabupaten guna ketepatan dalam proses penyediaan fasilitas lalu lintas yang sesuai kebutuhan;
- e. Meningkatkan kemanfaatan fasilitas lalu lintas yang sudah ada guna kelancaran akses transportasi di semua wilayah Kabupaten serta mendukung perkembangan sektor pariwisata;
- f. Mengoptimalkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor guna meningkatkan kelayakan angkutan umum darat yang akan berdampak

- untuk meminimalisir kejadian kecelakaan serta mencegah pencemaran udara yang disebabkan asap kendaraan bermotor roda 4 atau lebih;
- g. Mengoptimalkan koordinasi dengan Instansi Terkait terutama dengan pihak Kepolisian guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas;
 - h. Berperan aktif dan berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim terkait dengan penanganan masalah kecelakaan, ketersediaan rambu-rambu keselamatan lalu lintas pada jalan Provinsi yang berada di Wilayah Kabupaten;
 - i. Berupaya meningkatkan kinerja manajemen pengelolaan data untuk menyediakan data dan informasi di bidang perhubungan yang akurat guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat maupun Instansi terkait akan ketersediaan data dan informasi terkait pelayanan perhubungan;
 - j. Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi atau Aplikasi serta Website Dinas Perhubungan untuk manajemen pengelolaan data dan informasi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat maupun Instansi terkait;
 - k. Melakukan koordinasi dan konsultasi antar Instansi terkait baik dengan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat guna meningkatkan kinerja perencanaan peningkatan akuntabilitas kinerja;
 - l. Melakukan manajemen SDM guna terpenuhinya Aparatur Perhubungan yang memiliki kompetensi guna memenuhi standar pelayanan sesuai SPM Perhubungan;
 - m. Berupaya untuk lebih meningkatkan kompetensi para Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Diklat, Bimtek, Pelatihan, Sosialisasi dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik;
 - n. Kepala Dinas Perhubungan harus lebih cermat dalam merumuskan kebijakan serta perencanaan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan, terutama harus mempertimbangkan asas manfaat dan

nilai keberlanjutan dari suatu kegiatan, agar kegiatan yang dilaksanakan bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini dibuat, semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan mendukung mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu mewujudkan masyarakat kutai kartanegara yang sejahtera dan bahagia.

Tenggarong, 22 Pebruari 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara



Ahmad Junaidi, S.Pd., MM

Pembina TK.I

NIP.19720224 199203 1 006



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Kinerja
(1)	(2)		(3)
<u>Sasaran sesuai RPJMD:</u>			
Meningkatnya aksesibilitas dan Konektifitas wilayah	1	Indeks aksesibilitas wilayah	84,18
<u>Sasaran 1 Renstra:</u>			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perhubungan	1	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78
<u>Sasaran 2 Renstra:</u>			
Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana serta Fasilitas Perhubungan	2	Prosentase ketersediaan prasarana Jalan	29,25%
	3	Prosentase ketersediaan perlengkapan Jalan	1,16%
	4	Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	27%
	5	Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	25%
<u>Sasaran 3 Renstra:</u>			
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kinerja Aparatur	6	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	82

Tenggarong, Januari 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara



Ahmad Junaidi, S.Pd., MM

Pembina TK I

NIP. 19720224 199203 1 006

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) :
 - 1) Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - 2) Prosentase ketersediaan prasarana Jalan
 - 3) Prosentase ketersediaan perlengkapan Jalan
 - 4) Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - 5) Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 6) Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Renstra 2022	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<u>Sasaran 1 Renstra:</u>				
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perhubungan	1 Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan dari Dinas Perhubungan	78	Nilai
	<u>Sasaran 2 Renstra:</u>				
2	Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana serta Fasilitas Perhubungan	1 Prosentase ketersediaan prasarana Jalan	Jumlah (komulatif) prasarana Jalan yang tersedia dibagi jumlah prasarana jalan yang seharusnya tersedia dikali 100%	29,25%	Persen
		2 Prosentase ketersediaan perlengkapan Jalan	Jumlah (komulatif) perlengkapan Jalan yang tersedia dibagi jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia dikali 100%	1,16%	Persen
		3 Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah (komulatif) Sarana dan Prasaran Pelabuhan Pengumpan Lokal yang tersedia dibagi jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal yang seharusnya tersedia dikali 100%	27%	Persen
		4 Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah (komulatif) Sarana dan Prasaran Pelabuhan Sungai, Danau Dan Penyeberangan yang tersedia dibagi jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau Dan Penyeberangan yang seharusnya tersedia dikali 100%	25%	Persen
	<u>Sasaran 3 Renstra:</u>				
3	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kinerja Aparatur	1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Hasi evaluasi LKJIP oleh Inspektorat tiap tahunnya	82	Nilai

Tenggarong, Januari 2022
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara


Ahmad Junaidi, S.Pd., MM
Pembina TK I
NIP. 19720224 199203 1 006



LAMPIRAN 3

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

TAHUN 2022

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TERHADAP KEGIATAN TAHUN 2022
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Capaian	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)		(2)	(5)		(6)
<u>Sasaran 1 Renstra:</u>					
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perhubungan	1	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	107%	95%	88%
<u>Sasaran 2 Renstra:</u>					
Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana serta Fasilitas Perhubungan	1	Prosentase ketersediaan prasarana Jalan	100%	99%	99%
	2	Prosentase ketersediaan perlengkapan Jalan	100%	99%	99%
	3	Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	100%	97%	97%
	4	Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	100%	97%	97%
<u>Sasaran 3 Renstra:</u>					
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kinerja Aparatur	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	95%	95%	100%

Tenggarong, 22 Pebruari 2023

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara**



Ahmad Iunaidi, S.Pd., MM

Pembina TK. I

NIP. 19720224 199203 1 006



LAMPIRAN 4

PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI

TAHUN 2022

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

- | | |
|--------------------|---|
| 1 Perangkat daerah | : Dinas Perhubungan |
| 2 Jabatan | : Kepala Seksi Angkutan Perhubungan Darat |
| 3 Tahun | : 2022 |

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Dokumen	1	1	100%
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Unit	2	1	100%
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Unit	1	2	100%
4	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / Atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten Kota	Jumlah Laporan	4	2	100%
5	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabuapten /Kota (PPTK)	Jumlah Dokumen	1	1	100%

Tenggarong, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT


Irwan Sukarta, SE., MT
Pembina
NIP. 19770314 200012 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Angkutan


Juliana, S.Sos
Penata TK I
NIP. 19730711 200012 2 002

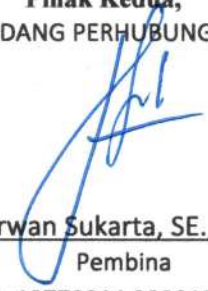
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

- 1 Perangkat daerah : Dinas Perhubungan
2 Jabatan : PLT. Kepala Seksi Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas Darat
3 Tahun : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	4	4	100%
2	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	5	5	100%
3	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Unit	976	976	100%

Tenggarong, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT


Irwan Sukarta, SE., MT
Pembina

NIP. 19770314 200012 1 001

Pihak Pertama,
PLT. Kepala Seksi Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas Darat


Abror Sungudi, S.Sos. MSi
Penata TK.I

NIP. 19751210 200701 1 021

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

- 1 Perangkat daerah : Dinas Perhubungan
2 Jabatan : JFT Analis Kebijakan
3 Tahun : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit	168	168	100%
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Unit	2	2	100%
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Unit	1.139	1.139	100%

Tenggarong, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT



Irwan Sukarta, SE., MT
Pembina
NIP. 19770314 200012 1 001

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan



Alfiansyah, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19750608 200112 1 002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

1 Perangkat daerah : Dinas Perhubungan
 2 Jabatan : Kepala Bidang Perhubungan Darat
 3 Tahun : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana serta Fasilitas Perhubungan	Prosentase ketersediaan prasarana Jalan	29,25%	29,25%	100%
		Prosentase ketersediaan perlengkapan Jalan	1,16%	1,16%	100%

**Pihak Kedua,
KEPALA DINAS**

Ahmad Junaidi, S.Pd., MM
 Pembina TK.I

NIP. 19720224 199203 1 006

Tenggarong, 17 Januari 2023

**Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
DARAT**

Irwan Sukarta, SE., MT
 Pembina

NIP. 19770314 200012 1 001

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

- 1 Perangkat daerah : Dinas Perhubungan
2 Jabatan : JFT Pengawas Keselamatan Pelayaran
3 Tahun : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	7	7	100%

Tenggarong, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

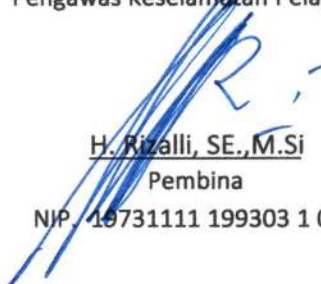


Sugianto, S. Sos., M.Si

Penata TK. I

NIP. 19660911 200012 1 003

Pihak Pertama,
Pengawas Keselamatan Pelayaran



H. Rizalli, SE., M.Si

Pembina

NIP. 19731111 199303 1 004

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

- 1 Perangkat daerah : Dinas Perhubungan
2 Jabatan : Kepala Seksi Angkutan Laut
3 Tahun : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan	7	7	100%

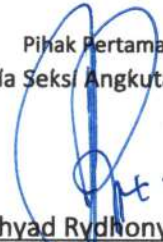
Tenggarong, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT



Sugianto, S. Sos., M.Si
Penata TK. I
NIP. 19660911 200012 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Angkutan Laut



Ahyad Rydhony. SE
Penata TK.I
NIP. 19700922 200112 1 002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

- 1 Perangkat daerah : Dinas Perhubungan
2 Jabatan : Kepala Seksi Pelabuhan
3 Tahun : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Unit	1	1	100%

Tenggarong, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT



Sugianto, S. Sos., M.Si

Penata TK. I

NIP. 19660911 200012 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pelabuhan



H. Kendarjo, S.T, M.Si

Pembina

NIP. 19730526 200312 1 004

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

- 1 Perangkat daerah : Dinas Perhubungan
2 Jabatan : Kepala Bidang Perhubungan Laut
3 Tahun : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana serta Fasilitas Perhubungan	Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	27%	27%	100%

Tenggarong, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

Ahmad Junaidi, S.Pd., MM
Pembina TK.I
NIP. 19720224 199203 1 006

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

Sugianto, S. Sos., M.Si
Penata TK. I
NIP. 19660911 200012 1 003

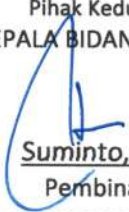
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

- 1 Perangkat daerah : Dinas Perhubungan
2 Jabatan : JFT Pengawas Keselamatan Pelayaran
3 Tahun : 2022

No	Sasaran Kegiatan		Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
-	-		-	-	-	-

Tenggarong, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG ASDP


Suminto, SE
Pembina

NIP. 19670712 200112 1 003

Pihak Pertama,
Pengawas Keselamatan Pelayaran


Salasnan, SE., M.Si
Penata TK.I

NIP. 19691223 200701 1 018

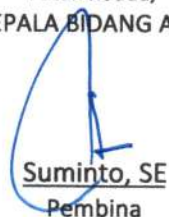
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

1 Perangkat daerah : Dinas Perhubungan
 2 Jabatan : Kepala Seksi ASDP
 3 Tahun : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen	3	3	100%
2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Unit	3	3	100%
3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Unit	3	3	100%

Tenggarong, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
 KEPALA BIDANG ASDP


Suminto, SE
 Pembina

NIP. 19670712 200112 1 003

Pihak Pertama,
 Kepala Seksi ASDP


Nuzul Hidayat
 Penata TK. I

NIP.19681208 199203 1 013

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

- 1 Perangkat daerah : Dinas Perhubungan
 2 Jabatan : Kepala Bidang ASDP
 3 Tahun : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana serta Fasilitas Perhubungan	Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	25%	25%	100%

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

Ahmad Junaidi, S.Pd.,MM
 Pembina TK.I
 NIP. 19720224 199203 1 006

Tenggarong, 17 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Bidang ASDP

Suminto, SE
 Pembina
 NIP. 19670712 200112 1 003

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

- 1 Perangkat daerah : Dinas Perhubungan
2 Jabatan : Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana ASDP
3 Tahun : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan	5	5	100%

Tenggarong, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG ASDP


Suminto, SE
Pembina

NIP. 19670712 200112 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana


Muhammad Fatwa, ST
Penata

NIP. 19810917 200604 1 008

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

1 Perangkat daerah : Dinas Perhubungan
2 Jabatan : Sekretaris
3 Tahun : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	83,84	107%
2	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kinerja Aparatur	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	82	77,90	95%

Tenggarong, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

Pihak Pertama,
SEKRETARIS


Ahmad Junaidi, S.Pd., MM
Pembina TK.I
NIP. 19720224 199203 1 006


Yudi Apidiantara, ST., MT
Pembina TK.I
NIP. 19720829 199803 1 010

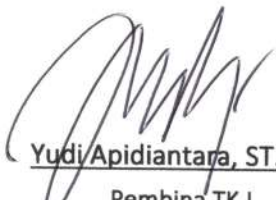
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

1 Perangkat daerah : Dinas Perhubungan
 2 Jabatan : Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
 3 Tahun : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	5	5	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	3	3	100%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2	2	100%
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	12	12	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	12	12	100%
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan	3	3	100%
7	Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen	1	1	100%

Tenggarong, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


Yudi Apidiantara, ST., MT
 Pembina TK.I
 NIP. 19720829 199803 1 010

Pihak Pertama,
KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN
KEUANGAN


Dedy Hendratno, SH
 Penata TK. I
 NIP. 19720625 200012 1 003

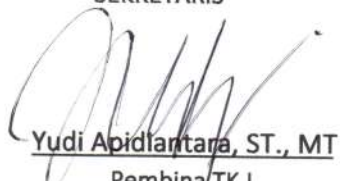
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

1 Perangkat daerah : Dinas Perhubungan
 2 Jabatan : Kasubbag Umum dan Tata Laksana
 3 Tahun : 2022

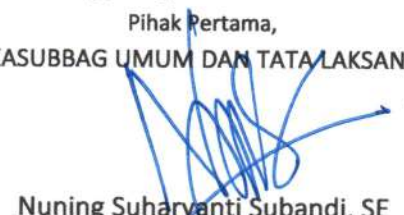
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	1	1	100%
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket	2	2	100%
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket	5	5	100%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket	4	4	100%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket	2	2	100%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	35	35	100%
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen	1	1	100%
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen	1	1	100%
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit	16	16	100%
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan	5	5	100%
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan	2.856	2.856	100%
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit	23	23	100%
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit	31	31	100%
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit	167	167	100%
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	3	3	100%
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	1	1	100%

Tenggarong, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


Yudi Apidiantara, ST., MT
 Pembina TK.I
 NIP. 19720829 199803 1 010

Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM DAN TATA LAKSANA


Nuning Suharyanti Subandi, SE
 Penata
 NIP. 19800723 200112 2 002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

- 1 Perangkat daerah : Dinas Perhubungan
2 Jabatan : Kepala Seksi Penertiban
3 Tahun : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	6	6	100%
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan	1	1	100%

Tenggarong, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL


Hamidin, S.Sos

Penata TK. I

NIP. 19701206 199203 1 006

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Penertiban


Agus Sofyan, S.Sos. MM

Pembina

NIP. 19740208 20012 1 002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

1 Perangkat daerah : Dinas Perhubungan
 2 Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional
 3 Tahun : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana serta Fasilitas Perhubungan	Prosentase ketersediaan prasarana Jalan	29,25%	29,25%	100%
		Prosentase ketersediaan perlengkapan Jalan	1,16%	1,16%	100%

Tenggarong, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
 KEPALA DINAS

Ahmad Junaidi, S.Pd.,MM
 Pembina TK.I
 NIP. 19720224 199203 1 006

Pihak Pertama,
 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN
 OPERASIONAL

Hamidin, S.Sos
 Penata TK. I
 NIP. 19701206 199203 1 006

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

- 1 Perangkat daerah : Dinas Perhubungan
 2 Jabatan : JFT Analisis Kebijakan
 3 Tahun : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan	1	1	100%

Tenggarong, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN
 OPERASIONAL


Hamidin, S.Sos

Penata TK. I

NIP. 19701206 199203 1 006

Pihak Pertama,
 Analisis Kebijakan


Abror Sungudi, S.Sos

Penata TK.I

NIP. 19751210 200701 1 021

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

1 Perangkat daerah : Dinas Perhubungan
 2 Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Parkir
 3 Tahun : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1	1	100%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	16	16	100%

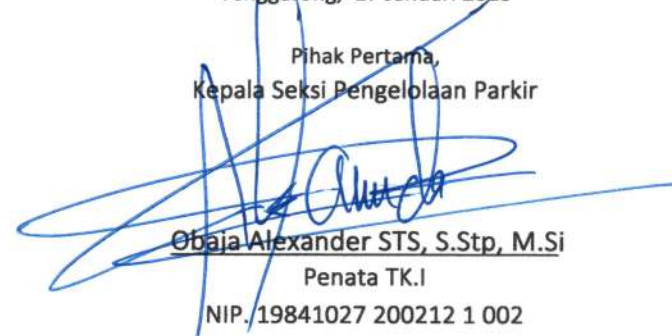
Tenggarong, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL


Hamidin, S.Sos
 Penata TK. I

NIP. 19701206 199203 1 006

Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Pengelolaan Parkir


Obaja Alexander STS, S.Stp, M.Si
 Penata TK.I

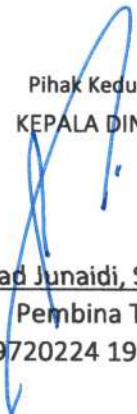
NIP. 19841027 200212 1 002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

- 1 Perangkat daerah : Dinas Perhubungan
2 Jabatan : Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
3 Tahun : 2022

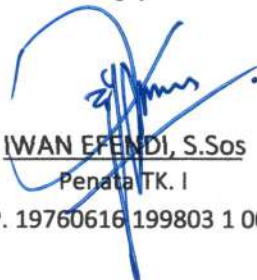
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	83,84	107%

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS


Ahmad Junaidi, S.Pd., MM
Pembina TK.I
NIP. 19720224 199203 1 006

Tenggarong, 17 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala UPT Pengujian Kendaraan


IWAN EFENDI, S.Sos
Penata TK. I
NIP. 19760616 199803 1 003

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

- 1 Perangkat daerah : Dinas Perhubungan
 2 Jabatan : Kepala Sub Bagian UPT PKB
 3 Tahun : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Unit	3	3	100%
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Orang	5	2	40%
3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan	6.000	167	3%
4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen	11.000	11.000	100%
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Unit	28	28	100%

Tenggarong, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
 KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PKB


Iwan Effandi, S.Sos
 Penata TK.I
 NIP. 19760616 199803 1 003

Pihak Pertama,
 KEPALA SUB BAGIAN TU UPT PKB


Sudibyo, Amd
 Penata
 NIP. 19771025 200604 1 010



LAMPIRAN 5

INFORMASI KINERJA LKjIP

TAHUN 2022

INFORMASI KINERJA TAHUN 2022

Kabupaten : Kutai Kartanegara
 Nama OPD : Dinas Perhubungan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Sasaran sesuai RPJMD:</u>					
Meningkatnya aksesibilitas dan Konektifitas wilayah	1 Indeks aksesibilitas wilayah	84,18	100	119%	Tercapai melebihi target
<u>Sasaran 1 Renstra:</u>					
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perhubungan	1 Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	83,84	107%	Tercapai melebihi target
<u>Sasaran 2 Renstra:</u>					
Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana serta Fasilitas Perhubungan	1 Prosentase ketersediaan prasarana Jalan	29,25%	29,25%	100%	Tercapai sesuai target
	2 Prosentase ketersediaan perlengkapan Jalan	1,16%	1,16%	100%	Tercapai sesuai target
	3 Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	27%	27%	100%	Tercapai sesuai target
	4 Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	25%	25%	100%	Tercapai sesuai target
<u>Sasaran 3 Renstra:</u>					
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kinerja Aparatur	1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	82	77,90	95%	Belum mencapai target Nilai LKIP 2021

Tenggarong, 22 Pebruari 2023

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara**



Ahmad Junaidi, S.Pd.,MM

Pembina TK.I

NIP. 19720224 199203 1 006



LAMPIRAN 6

PENGUMPULAN DATA KINERJA

TAHUN 2022

PENGUMPULAN DATA KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Formulasi (3)	Permintaan Data (4)	Target Kinerja (5)	Realisasi (6)	Program (7)
Sasaran 1 Restrukturisasi Meningkatnya Kapasitas Sarana Prasarana Perhubungan	1 Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan dari Dinas Perhubungan	Data dari Responden hasil Survey di UPT PKB, Parkir dan Dermaga Dishub Kutar	78	83,84	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	1 Prosentase ketersediaan prasarana jalan	Jumlah (komulatif) prasarana jalan yang tersedia dibagi jumlah prasarana jalan yang seharusnya tersedia dikali 100%	Data dari kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	29,25%	29,25%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	2 Prosentase ketersediaan perlengkapan jalan	Jumlah (komulatif) perlengkapan jalan yang tersedia dibagi jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia dikali 100%	Data dari kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1,16%	1,16%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	3 Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah (komulatif) Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang tersedia dibagi jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang seharusnya tersedia dikali 100%	Data dari kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pengelolaan Pelayaran	27%	27%	Program Pengelolaan Pelayaran
Sasaran 2 Restrukturisasi Meningkatnya Kapasitas Sarana Prasarana serta Fasilitas Perhubungan	4 Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah (komulatif) Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang tersedia dibagi jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang seharusnya tersedia dikali 100%	Data dari kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pengelolaan Pelayaran	25%	25%	Program Pengelolaan Pelayaran
	1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Hasil evaluasi LKIP oleh Inspektorat tiap tahunnya	Nilai Sadip Dishub Kutar Tahun 2021	82	77,90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tenggarong, 17 Februari 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara

Almari Junaldi, S.Pd., MM
Penbina TK1
NIP. 197710224 199203 1 006





RENCANA AKSI

TAHUN 2023

RENCANA AKSI
DINAS PERHUBUNGAN
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2023

Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	Target Sasaran Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan	Sub. Kegiatan	Target Program	Indikator Sasaran Kegiatan	Target Kinerja	Target capaian PerTriwulan				Anggaran	Penanggung Jawab
								I	II	III	IV		
Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%							67.127.916.621,00	
	Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan (IKM)		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									40.846.266.621,00	Sekretariat
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan	4 dokumen				100%	675.000.000,00	Sekretariat
			Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kritisasi Realisasi Kinerja SKPD	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kritisasi Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan kritisasi realisasi kinerja SKPD	3 dokumen				100%	200.000.000,00	Sekretariat
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan	2 dokumen				100%	200.000.000,00	Sekretariat
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								275.000.000,00	Sekretariat
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang	385/12 Orang				100	14.478.066.292,00	Sekretariat
				Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah ASN	12 orang/Bulan				100%	230.575.564,00	Sekretariat
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen	2 dokumen				100%	200.000.000,00	Sekretariat
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah							100%	100.000.000,00	Sekretariat
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 dokumen				100%	100.000.000,00	Sekretariat
			Administrasi Kepagawalan Perangkat Daerah	Administrasi Kepagawalan Perangkat Daerah								3.168.340.000,00	Sekretariat
				Pengadaan Pakuan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakuan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakuan Dinas Yang Didadakan	385 Stel				100%	2.418.340.000,00	Sekretariat
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen	2 dokumen				100%	90.000.000,00	Sekretariat
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Lokasi	5 Kecamatan				100%	150.000.000,00	Sekretariat
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Tim peserta dan	20 orang				100%	400.000.000,00	Sekretariat
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta	2 orang kegiatan				100	150.000.000,00	Sekretariat
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah								2.571.745.565,00	Sekretariat
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen dan Instalasi Listrik	200 unit				100	100.000.000,00	Sekretariat
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat perlengkapan kantor	Paket				100	247.076.000,00	Sekretariat
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Barang ATK dan Jumlah ASN	54 jenis barang				100%	350.000.000,00	Sekretariat
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah dokumen Penggandaan	2 Paket				100%	100.000.000,00	Sekretariat
				Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN	35 orang/kali				100%	750.000.000,00	Sekretariat

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	80%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pentausahaan/Arup Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen	1 kegiatan		100%		649.669.565,00	Sekretariat
				Dukungan/Peleaksanaan Sistem-Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah website dan aplikasi	1 paket		100%		375.000.000,00	Sekretariat
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah					100%		4.477.924.000,00	Sekretariat
									100%		2.700.000.000,00	Sekretariat
						Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	4		100%		200.000.000,00	Sekretariat
						Pengadaan Mebel	1		100%		1.577.924.000,00	Sekretariat
						Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	2		100%		13.045.190.764,00	Sekretariat
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%		8.364.896.460,00	Sekretariat
						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	5 kegiatan		100%		4.680.494.304,00	Sekretariat
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	238 Orang		100%		2.330.000.000,00	Sekretariat
				Pemeliharaan Burang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%		250.000.000,00	Sekretariat
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23 unit		100%		780.000.000,00	Sekretariat
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31 unit		100%		100.000.000,00	Sekretariat
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	167 unit		100%		800.000.000,00	Sekretariat
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit		100%		300.000.000,00	Sekretariat
						Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		100%		100.000.000,00	Sekretariat
						Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		100%			Sekretariat
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100%				100%		18.708.660.000,00	Bidang Darat, Dal. Opa. dan UPT PKB
				Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota					100%		9.200.000.000,00	Bidang Darat
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota		Jumlah LPJU yang dipasang	140 unit		100%		450.000.000,00	Bidang Darat
				Penyediaan perlekapan jalan di Jalan Kabupaten / Kota		Jumlah Perlekapan Jalan yang disediakan (	250 unit		100%		5.950.000.000,00	Bidang Darat
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah LPJU dipelihara					-	Bidang Darat
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan		Jumlah unit Perlekapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	261 unit		100%		2.800.000.000,00	Bidang Darat
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C							450.000.000,00	Bidang Darat
				Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Dokumen	1 Dokumen		100%		-	Bidang Darat
				Pembangunan Gedung Terminal		Jumlah Gedung Terminal	-				-	Bidang Darat
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Kembangkan	1 Unit				150.000.000,00	Bidang Darat

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Jumlah terminal yang dipelihara	2 lokasi		100%		300.000.000,00	Bidang Darat
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembinaan Fasilitas Parkir									
	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan			1 Kegiatan				500.000.000,00	Bidang Dalops
	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota			16 Kecamatan				200.000.000,00	Bidang Dalops
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			10500		100%		1.400.000.000,00	UPT PKB
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.			8 Kecamatan				50.000.000,00	UPT PKB
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			20 unit				950.000.000,00	UPT PKB
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			1		100%		50.000.000,00	UPT PKB
Pelaksanaan manajemen dn Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								5.000.000.000,00	Bidang Darat
	Pemetaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota			15 kecamatan				200.000.000,00	Bidang Darat
	Pengadaan Pemasangan , Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekaya Lalu Lintas			150 unit.				3.431.660.000,00	Bidang Darat
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			10 kecamatan				700.000.000,00	Bidang Darat
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota			4 Kegiatan		100%		675.000.000,00	Bidang Darat
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan									
	Pelaksanaan inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor			1 Kegiatan				100.000.000,00	Bidang Dalops
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor			1 Kegiatan				100.000.000,00	Bidang Dalops
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota								-	Bidang Dalops
	Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota			1 dokumen				-	Bidang Darat
Program Pengelolaan Bidang Pelayaran									
Penerbitan izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota		100%						9.676.000.000,00	Bidang Laut dan ASDP
								250.000.000,00	Bidang Laut

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah tempat usaha	6 kecamatan		100%	250.000.000,00	Bidang Laut
Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) /Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelembutan Sungai dan Danau						100%	375.000.000,00	Bidang ASDP
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelembutan Pengumpulan Lokal		Jumlah Dokumen	1 Dokumen		100%	375.000.000,00	Bidang ASDP
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelembutan Pengumpulan Lokal						100%	2.000.000.000,00	Bidang Laut
	Pembangunan Pelembutan Pengumpulan Lokal		Jumlah Dermaga				2.000.000.000,00	Bidang Laut
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelembutan Sungai dan Danau						100%	6.960.000.000,00	Bidang ASDP
	Pengawasan Pengoperasian Pelembutan Sungai dan Danau		Jumlah lokasi	6 kecamatan		100%	200.000.000,00	Bidang ASDP
	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau		Jumlah pelembutan/dermaga	2 paket		100%	250.000.000,00	Bidang ASDP
	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau		Jumlah unit Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	3 kecamatan		100%	6.500.000.000,00	Bidang ASDP

Tenggarong, 17 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara

Ahmad Junaldi, S.Pd., MM

Pembina TK I

NIP. 19710224 199203 1 006



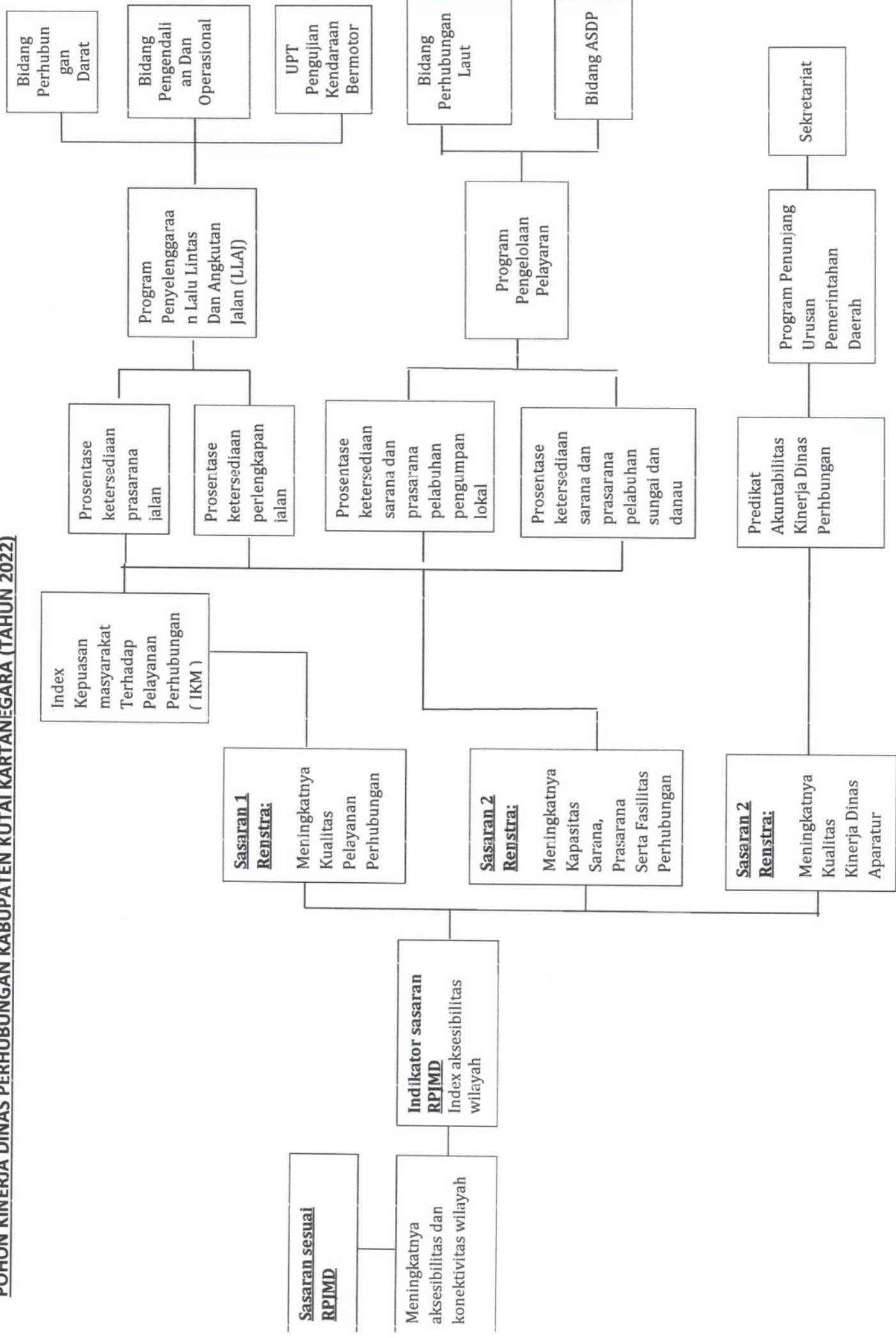


POHON KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

POHON KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (TAHUN 2022)





JADWAL PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2022

JADWAL PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2022
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Uraian Kegiatan	Bulan (Tahun 2023)											
		Januari				Pebruari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen LKjIP												
2	Penyajian dan input data-data sebagai bahan penyusunan dokumen LKjIP												
3	Pengumpulan bahan literatur, kepastakaan, dan bahan referensi lainnya yang mendasari penyusunan LKjIP												
4	Kajian literatur, kepastakaan, sebagai bahan referensi penyusunan LKjIP												
5	Penyusunan BAB I Pendahuluan												
6	Penyusunan BAB II Perencanaan Kinerja												
7	Penyusunan BAB III Akuntabilitas Kinerja												
8	Penyusunan BAB IV Penutup												
9	Penyusunan Bagian Akhir, yaitu: Penyajian lampiran-lampiran yang diperlukan dalam dokumen LKjIP												
10	Tahap Pencetakan dan Penjilidan, serta Pengumpulan Dokumen LKjIP												

Keterangan :

"Proses Penyusunan Dokumen LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 dimulai pada awal bulan Januari 2023 dan telah selesai dan dicetak/ jilid pada bulan Pebruari 2023. Dengan demikian dokumen LKjIP ini telah terselesaikan dengan jangka waktu sekitar 1,5 bulan."